



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat 6 alasan utama mengapa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi untuk dibangun. Pertama, Indonesia memiliki sumberdaya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Indonesia memiliki daya saing (*competitive advantage*) yang tinggi dan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya. Ketiga, industri di sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan (*backward and forward linkage*) yang kuat dengan industri-industri lainnya. Keempat, sumberdaya di sektor kelautan dan perikanan merupakan sumberdaya yang selalu dapat diperbaharui (*renewable resource*) sehingga bertahan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif. Kelima, investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang relative tinggi sebagaimana dicerminkan dalam *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang rendah dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi pula. Keenam, pada umumnya industri perikanan berbasis sumberdaya lokal dengan input rupiah namun dapat menghasilkan output dalam bentuk dolar.

Sejalan dengan misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu *social equity, economic growth, environmental sustainability*, peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan, peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia.

Manusia yang memanfaatkan sumberdaya ikan memiliki emosi, strategi, intrik, taktik, tujuan, visi, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, pengalaman, keinginan, dan perasaan yang semuanya secara bersama-sama menentukan sikap mereka dalam memanfaatkan sumberdaya. Namun demikian komitmen pendayagunaan sumberdaya masih kurang. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataannya bahwa nelayan selaku aktor utama disektor ini masih berada dibawah garis kemiskinan.

Batas kemiskinan ditinjau dari batas pendapatan individu atas hasil upaya individu dinyatakan dalam bentuk nilai *poverty line* baik secara nasional maupun regional. *Poverty line* Nasional menurut BPS adalah Rp. 308.826 kapita/bulan,



Povertyline(regional) propinsi Jawa Timur adalah Rp. 257.510kapita/bulan; Pendapatan Layak minimum Regional (kabupaten) Nganjuk, Rp. 777.489 kapita/bulan, Blitar Rp. 766.680 kapita/bulan, dan Lumajang Rp. 819.392 kapita/bulan(BPS, September 2013).

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur data terakhir September 2013 yaitu 4.865.820 jiwa sedangkan Indonesia yaitu 28.553.930 jiwa, yang berarti Jawa Timur menyumbang kemiskinan sebesar 17,04%. Balitbang berpendapat bahwa upaya terus menerus untuk memperbaiki cara penanggulangan penduduk miskin sangat diperlukan dengan pertimbangan bahwa semakin banyak cara dan strategi kreatif dipergunakan maka semakin berpeluang untuk dapat menanggulangi dan mengurangi kemiskinan, karena faktor penyebab kemiskinan itu sendiri sangat bervariasi.

a) Pendekatan Masalah

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.Dari status penguasaan kapital, nelayan dapat dibagi menjadi nelayan tradisional dan nelayan buruh.Nelayan tradisional secara umum merupakan kelompok sosial yang paling terpuruk tingkat kesejahteraannya, sementara kondisi ini sangat dekat dengan tekanan ekonomi, pendapatan yang tidak menentu sehingga menyebabkan rendahnya perolehan rumah tangga dari aktivitas sebagai nelayan.Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor baik positif maupun negatif.

b) Keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha

Hal ini disebabkan oleh tanggungan keluarga yang tinggi.Selain biaya kehidupan nelayan yang banyak. Hal ini diperburuk lagi dengan jumlah anak yang mereka miliki dan sumber pendapatan yang diperoleh dari satu orang.Keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak dimilikinya akses ke pelayanan kredit.Selain kurangnya informasi mengenai pengajuan kredit juga dikarenakan ketidakmampuan nelayan dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diajukan oleh pihak pemberi kredit.



c) Tingkat pendidikan rendah

Tingkat pendidikan sumberdaya manusia yang rendah merupakan salah satu permasalahan yang juga dapat menyebabkan nilai tambah mengapa nelayan miskin. Biaya pendidikan yang tinggi, lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal merupakan alasan bagi nelayan untuk memilih tidak bersekolah. Selain itu nelayan merasa tidak memerlukan pendidikan formal karena sebagian besar waktunya lebih banyak dihabiskan di laut.

d) Pendapatan yang rendah

Faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan nelayan rendah antara lain adalah unit penangkapan yang terbatas yang dikarenakan penguasaan teknologi yang rendah, skala usaha/modal yang dimiliki kecil dan masih bersifat tradisional, kemampuan nelayan dalam memanfaatkan peluang usaha dan mengatasi tantangan lingkungan yang rendah, dikarenakan masyarakat yang masih bergantung pada musim penangkapan, dalam penentuan *fishing ground* nelayan yang mempunyai izin untuk melakukan operasi di tempat tersebut akan memperoleh hasil yang banyak, tetapi bagi nelayan yang tidak memiliki akses ke lokasi yang produktif maka hasil tangkapan tersebut tidak maksimal dan biaya operasi tinggi. Eksternalitas teknologi terjadi karena nelayan cenderung melakukan penangkapan ikan pada lokasi yang sama atau setidaknya saling berdekatan satu dengan yang lain sehingga terjadi pertemuan antara alat tangkap ikan yang digunakan yang menjurus pada kerusakan atau perusakan. Faktor lainnya adalah *law enforcement* yang tidak berpihak kepada nelayan, diantaranya terjadinya ego sektoral, regulasi yang tidak mendukung, terbatasnya peran kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah, penetapan bahan baku (ikan) yang kurang adil, belum ditetapkannya undang-undang anti monopoli, pembagian keuntungan yang tidak proporsional dan kebijakan ekonomi secara mikro yang lebih banyak memberikan kerugian di pihak nelayan dibandingkan memberikan keuntungan. Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu kelancaran usaha lebih dikenal dengan *kredit produktif* yaitu kredit yang diberikan perbankan guna membantu para pengusaha untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan usahanya yang terdiri dari *kredit investasi* dan *kredit modal kerja*.



e) Perilaku ekonomi rumah tangga nelayan,

Beberapa alasan yang menjadikan perilaku ekonomi nelayan yang buruk adalah budaya boros, dimana pendapatan hari ini dihabiskan pada hari yang sama pula, tidak ada kesadaran untuk memiliki tabungan, dan pola konsumsi yang cenderung tidak teratur.

f) Tidak ada alternatif *livelihood*,

Dengan segala bentuk keterbatasannya sehingga nelayan tidak mampu memiliki mata pencaharian lain, keterbatasan tersebut antara lain tidak memiliki keahlian lain selain menjadi nelayan, terbatasnya peluang kerja bagi mereka dan kemampuan melihat peluang kerja yang rendah.

g) Perencanaan secara regional yang tidak mendukung,

Dalam menetapkan kebijakannya pemerintah hampir tidak memperhatikan adanya perbedaan mendasar secara demografi dan geografi, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik pada daerah-daerah tertentu dan tidak disosialisasikan seperti dalam kebijakan mengenai pengelolaan hasil laut ke masyarakat nelayan serta tidak adanya pembinaan mengenai teknologi manajemen industri. Faktor-faktor penyebab mengapa nelayan miskin walaupun mereka merupakan aktor utama dalam operasional yang diuraikan dengan menggunakan *problem tree analysis* dapat diketahui bahwa persoalan yang dihadapi bersifat kompleks selain disebabkan oleh sifat ikan yang cepat membusuk, produksi yang berfluktuasi, akses terhadap modal masih kurang, penanganan pasca panen belum sempurna, teknologi masih sederhana, lokasi terpencar, dan tingkat pendidikan nelayan yang rendah serta ada keterikatan dengan pelepas uang. Sebagai akibatnya kualitas produk yang dihasilkan rendah dengan demikian harga jual produk juga menjadi rendah.

Dari berbagai pendekatan masalah yang dapat dilapangan, ada sebuah solusi yang dirasa mampu mengangkat perekonomian dan memberdayakan masyarakat miskin yaitu dengan peningkatan kemampuan berwira usaha dibidang budidaya rumput. Saat ini banyak program pemberdayaan yang menklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program



tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah: Bagaimana memberdayakannya?

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- Pembentukan kelembagaan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (*intermediate*) antara pemerintah dan swasta.
- Pendampingan pada pelaku usaha yang dibina atau diberdayakan, Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu.
- Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya.

Indonesia merupakan negara kelautan yang kaya dengan sumber daya kelautan. Salah satunya adalah rumput laut. Rumput Laut merupakan salah satu produk



komoditas perikanan yang dikembangkan sebagai “pertanian pantai”. Rumput laut Indonesia mempunyai harga sangat tinggi di pasaran dunia, bukankarena kandungan kimia di dalamnya memenuhi persyaratan (seperti agar-agar,karagen, alginat dan sebagainya) tetapi juga karena wilayah perairan pantai tempatganggang laut tersebut tumbuh rata-rata belum tercemar berat. Rumput laut yangbanyak dihasilkan Indonesia adalah jenis *Gracillaria* untuk bahan baku agar-agar dan *Eucheuma cotonii* untuk karaginan. Jenis-jenis tersebut dibudidayakan terutamadi Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Seribu, Bali, Lombok, Flores, Sumba dan Sulawesi. Pemanfaatan rumput laut dapat menghasilkan 500 jenis produk komersial,di antaranya karaginan, yang menjadi bahan baku kosmetik, parfum, obat-obatan,dan pasta gigi. Indonesia sendiri saat ini menempati urutan keempat setelah Chili,Maroko dan Philipina sebagai produsen utama rumput laut dunia.

Sayangnya, meski menempati posisi keempat sebagai produsen utama rumput laut dunia dan dari segi jumlah, perkembangan industri rumput laut di Indonesia cukup menggembirakan, tetapi produknya lebih banyak masih terbatas pada produk dasar(*base products*), bukan merupakan *end products* yang langsung dapat digunakan industri pengguna. Dengan demikian, peningkatan jumlah industri tersebut tidak dengan sendirinya mengurangi impor hasil olahan rumput laut dalam bentuk *end products*. Impor hasil olahan rumput laut pun masih terus berlanjut. Hal ini terjadi karena belum berkembang dan dikuasainya teknologi formulasi untuk menghasilkan *end products* yang siap digunakan oleh berbagai industri seperti industry makanan dan minuman, dan industri lainnya seperti industri tekstil, cat, kertas, farmasi, pasta gigi, dan *pet foods*.

Karena itu, pada dasarnya rumput laut masih mempunyai potensi untuk dikembangkan terutama didalam kaitannya dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan. Pengembangan komoditi rumput laut sebagai fokus dari salah satu komoditi unggulan sektor perikanan merupakan langkah strategis yang dipilih dengan pertimbangan bahwa: 1) pada tingkat pengembangan budidaya memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, teknologi budi daya yang sederhana, masa tanam yang relatif pendek sekitar 45 hari (*quick yield*) dan biaya per unit produksi



relatif sangat murah; 2) pada tingkat pengolahan hasil rumput laut melalui pengembangan industri pengolahan rumput laut memerlukan dukungan sektor lain.

1.2. Rumusan Masalah.

Dilihat dari judul diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah strategi pemberdayaan yang lebih kreatif dan inovatif, yang mampu memperkuat kompetensi kewirausahaan bidang budidaya rumput laut bagi masyarakat miskin ?
- 2) Bagaimanakah bentuk strategi dan program pemberdayaan masyarakat miskin yang mampu memperbaiki kompetensi keahlian masyarakat miskin dalam bidang kemampuan kewirausahaan budidaya rumput laut sebagai instrumen untuk keluar dari problem kemiskinannya ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi dan hambatan yang dialami pada pelaku usaha budidaya rumput laut, sehingga nantinya bisa diaplikasikan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dilokasi penelitian.
- Untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara/instrumen penanggulangan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha atau petani dalam budidaya rumput laut yang sudah dilakukan.
- Memperbaiki dan menciptakan program-program penanggulangan kemiskinan yang bisa diaplikasikan melalui kewirausahaan budidaya rumput laut dilokasi penelitian.
- Melakukan kajian untuk merumuskan suatu strategi pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Timur dengan kompetensi keahlian kewirausahaan di bidang budidaya rumput laut.

1.4. Hasil yang diharapkan

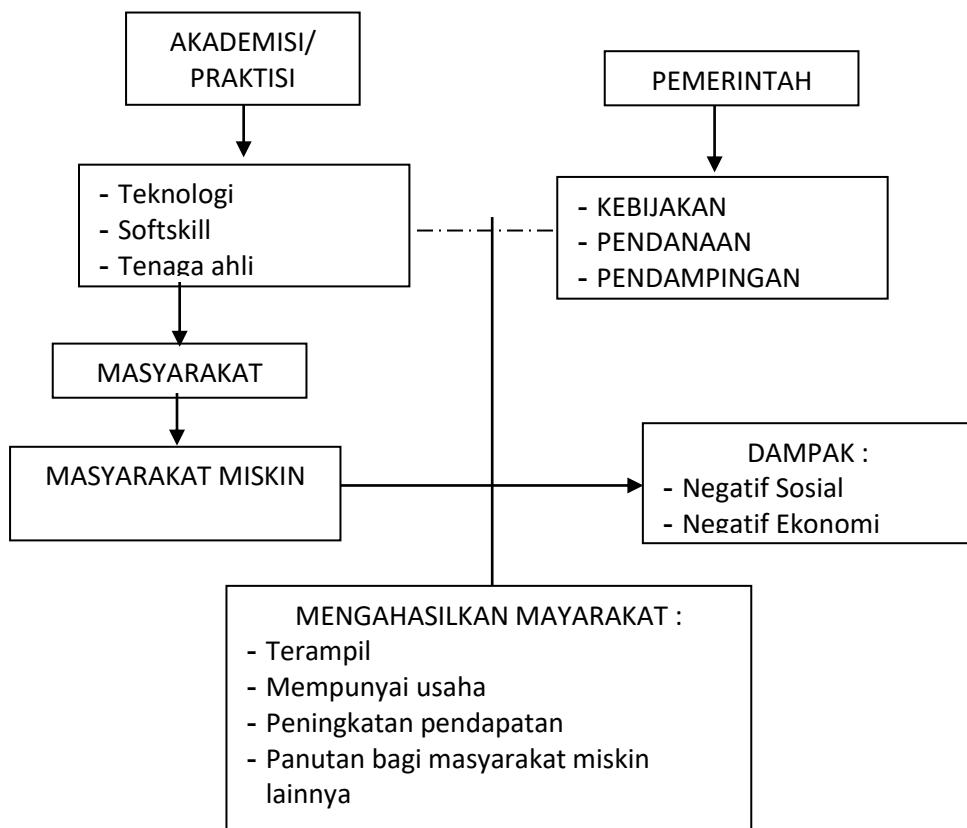
Menhasilkan sebuah dokumen model strategi pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan kewirausahaan budidaya rumput laut khususnya dilokasi penelitian yang kemudian diarahkan untuk pengaplikasian pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Timur.



1.5. Manfaat Penelitian

Hasil kegiatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) atau pihak terkait lainnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Timur, khususnya pemberdayaan dengan menggunakan instrumen kewirausahaan budidaya rumput laut.

1.6. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konsep Kegiatan Penelitian